FORM 4 : Formulir Pengisian Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran TPB/SDGs Untuk SKPD dan Instansi Vertikal
PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Nama Tujuan (1)
Nama Target (2)

Kode Indikator (3)	Indikator SDGs (4)	Indikator SDGs Kalsel (5)	Sumber Data (6)	Satuan (7)	Baseline (8)	Target SDGs (9)				Capaian SDGs (10)				Status (11)	Keterangan Capaian	Instansi Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2021	2021	
TUJUAN 16: PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH (*PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS*)																
16.1.1	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.															
16.1.1 (a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.															
16.1.2	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.															
16.1.2 (a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.															
16.1.3	Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir.															
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir															
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.															
16.2.1	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir	Persentase menuju kabupaten/kota layak anak	Data Mandiri UPTD PPA Batola		0	5	5	5	5	0	0	0	1			DPPKBP3A Bid. PPPA
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Persentase menuju kabupaten/kota layak anak	Data Mandiri UPTD PPA Batola	%	0	5	5	5	5	0	0	0	11			DPPKBP3A Bid. PPPA
16.2.1 (b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Persentase menuju kabupaten/kota layak anak		%	30,8	46,2	53,85	61,54								DPPKBP3A Bid. PPPA
16.2.2	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.	IKM (Indikator Kepuasan Masyarakat) tentang lembaga layanan P2TP2A			0	5	5	5	5	0	0	0	0			DPPKBP3A Bid. PPPA
16.2.3	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Persentase menuju kabupaten/kota layak anak								0	0	0				DPPKBP3A
16.2.3 (a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Persentase menuju kabupaten/kota layak anak		%	--	--	--	--								DPPKBP3A
16.3.1	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.															
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi															
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	Persentase pemenuhan bantuan hukum masyarakat miskin yang memerlukan bantuan hukum		orang	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		Bagian Hukum
16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.															

Kode Indikator (3)	Indikator SDGs (4)	Indikator SDGs Kalsel (5)	Sumber Data (6)	Satuan (7)	Baseline (8)	Target SDGs (9)				Capaian SDGs (10)				Status (11)	Keterangan Capaian	Instansi Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2021	2021	
16.3.2	Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana															
16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.															
16.4.1	Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri (dalam US$).															
16.4.2	Proporsi senjata api dan senjata ringan yang disita, yang terdaftar dan terlacak, yang sesuai dengan standar internasional dan ketentuan hukum.															
16.5.1	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.															
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).															
16.5.2	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.															
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda Prov. Kalsel		Dokumen	2	0	0	0	-	-	-	-	-			Bagian Umum
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kab/Kota).															
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Nilai SAKIP Pemda A		Nilai	77,29 (BB)	80,26 (A)	80,55 (A)	80,56 (A)	77,05	-	67,00	67,61	-			Bagian Organisasi, Inspektorat, Bappeda,seluruh SKPD
		Perencanaan dan Pelaporan Setda Prov. Kalsel		Dokumen	2	0	0	0	-	-	-	-	-			Bagian Umum
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan *E-procurement* terhadap belanja pengadaan.	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.		%	100	100	100	100	-	-	-	-	-			Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Bagiankrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).															
		Nilai (skor) kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.		Nilai (skor)	T (2,8220)	T (2,8330)	T (2,8400)	T (2,8500)	T (2,8500)	-	-	-	-			Bagian Pemerintahan
		persentase kesepakatan bersama yang ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.		Baik, 100%	Baik, 100%	Baik, 100%	Baik, 100%	Baik, 100%	Baik, 100%	Baik, 100%	Baik, 100%	Baik, 100%	Baik, 100%			Bagian Pemerintahan
		Meningkatnya Kompetensi ASN Provinsi Kalimantan Selatan		Jumlah Orang	T (1,322)	T (2,908)	T (4,433)	T (4,710)								BPSDMD

Kode Indikator (3)	Indikator SDGs (4)	Indikator SDGs Kalsel (5)	Sumber Data (6)	Satuan (7)	Baseline (8)	Target SDGs (9)				Capaian SDGs (10)				Status (11)	Keterangan Capaian	Instansi Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2021	2021	
16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.	Presentase SKPD dengan indeks kualitas layanan publik kategori Baik		%	35	50	70	90	95	-	-	84,00	-			Seluruh SKPD (Leading sektor: Bagian Organisasi)
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Presentase SKPD dengan indeks kualitas layanan publik kategori Baik		%	35	50	70	90	95	-	-	84,00	-			Seluruh SKPD (Leading sektor: Bagian Organisasi)
16.7.1	Proporsi jabatan (menurut kelompok umur, jenis kelamin, disabilitas dan kelompok masyarakat) di lembaga publik (DPR/DPRD, pelayanan publik, peradilan) dibanding distribusi nasional.															
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Rekomendasi Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti.														Bagian Pemerintahan
				%	100	100	100	100	-	-	-	-	-			Bagian Pemerintahan
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).															
16.7.2	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.															
16.7.2 (a)	Indeks Lembaga Demokrasi	Persentase perempuan pengurus parpol tingkat provinsi		indeks	89,15	89,5	90	90,5	90,5	89,15	89,5	90	90,5			Kesbangpol
16.7.2 (b)	Indeks Kebebasan Sipil.	Konflik berlatar belakang politik		indeks	100	100	100	100	100	100	100	100	100			Kesbangpol
16.7.2 (c)	Indeks Hak-hak Politik	Persentase pemilih dalam pemilu/pilkada		indeks	73,93	74	74,5	75	75	73,93	74	74,5	75			Kesbangpol
16.8.1	Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara-negara berkembang di Organisasi Internasional.															
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur															
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.															
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.															
16.10.1	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.															
16.10.1.(a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).															
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan															

Kode Indikator (3)	Indikator SDGs (4)	Indikator SDGs Kalsel (5)	Sumber Data (6)	Satuan (7)	Baseline (8)	Target SDGs (9)				Capaian SDGs (10)				Status (11)	Keterangan Capaian	Instansi Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2021	2021	
16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.															
16.10.2. (a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Publik		%	69,12	72,58	-	-								Bagian Humas dan Protokol Setda Prov. Kalsel
		Persentase kegiatan Kepala Daerah yang didokumentasikan		%	-	-	100	100		100	100	100				Bagian Humas dan Protokol Setda Prov. Kalsel
16.10.2. (b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.															
16.10.2. (c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.															
16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles															
16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.															
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.															

Kode Indikator (3)	Indikator SDGs (4)	Indikator SDGs Kalsel (5)	Sumber Data (6)	Satuan (7)	Baseline (8)	Target SDGs (9)				Capaian SDGs (10)				Status (11)	Keterangan Capaian	Instansi Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2021	2021	

Kode Indikator (3)	Indikator SDGs (4)	Indikator SDGs Kalsel (5)	Sumber Data (6)	Satuan (7)	Baseline (8)	Target SDGs (9)				Capaian SDGs (10)				Status (11)	Keterangan Capaian	Instansi Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2021	2021	